



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Agustus 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM KOMUNIKASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG SURYO AJI**
2. Jabatan : **DIREKTUR SISTEM KOMUNIKASI**
3. NHK : **404186**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.000.000

1. MOTOR, HONDA C11830 A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



3. MOBIL, HONDA CRV RE1 2 W-D 2.0 MT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	122.067.691
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.656.067.691
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.656.067.691

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.